

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi tidak normal, yang kemudian ditandai dengan tubuh kerdil, serta berat badan yang tidak seimbang, dan kurangnya kemampuan kognitif si anak. *Stunting* dapat terjadi diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi seimbang pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Maka, pada rentang usia 0-3 tahun anak tidak mendapatkan pola makan yang baik serta kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak, hal ini memungkinkan seorang anak mengalami kondisi *stunting* (Utomo, 2018) Maka karena hal itu gizi yang seimbang perlu dikonsumsi anak sejak usia dini, untuk mendapatkan kesehatan yang baik karena hal ini berdampak pada kualitas kehidupan si anak kedepannya.

Hasil pemetaan status gizi melalui kegiatan Bulan Penimbangan Balita menunjukkan besaran masalah KEP (Kekurangan Energi Protein) di Kabupaten Bogor, yaitu gizi kurang, pendek, dan kurus. Ketiga bentuk masalah KEP tersebut mempunyai riwayat dan pendekatan pemecahan yang berbeda. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U (Berat Badan Umur) memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan.

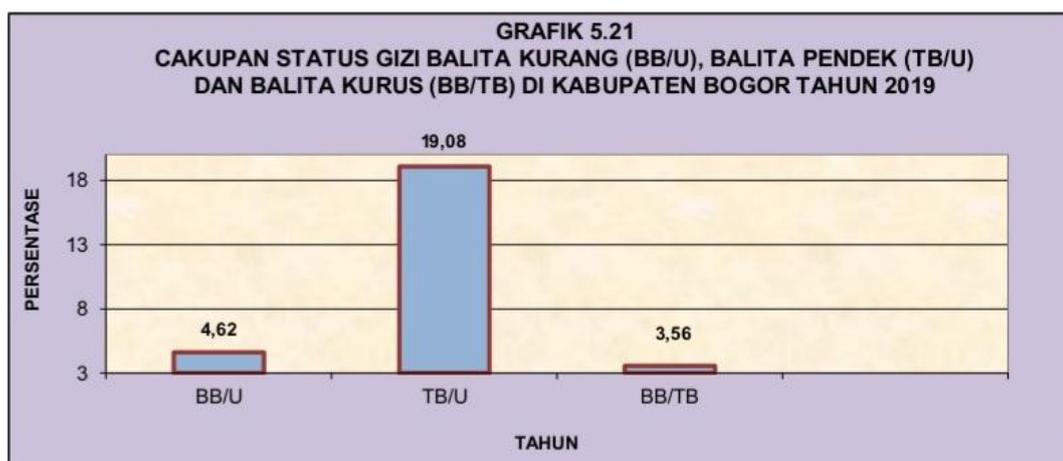
Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Di Kabupaten Bogor prevalensi berat badan kurang (KEP) sebesar 4.62% terdiri dari 0.81% berat badan sangat kurang, dan 3.82% berat badan kurang. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi berat kurang di propinsi Jawa Barat sebesar 13,2% dan prevalensi nasional sebesar 17,7% berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 2020).



Gambar 1.1 Grafik Cakupan Balita BGM Kabupaten Boogor 2015-2019

Sumber: Disnakes Kabupaten Bogor.

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa cakupan balita BGM (Bawah Garis Merah) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 lebih cenderung berfluktuasi. Temuan kasus BGM merupakan salah satu Sistem Kewaspadaan Dini Gizi (SKD-Gizi), yang memang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya kasus balita kurang gizi. Faktor yang menjadi penyebab langsung balita BGM antara lain asupan makanan yang kurang, penyakit/infeksi, sosial ekonomi dan pendidikan orang tua rendah, serta pola asuh yang salah. Balita BGM jika tidak dipantau kondisinya dapat berakibat akan jatuh ke status gizi buruk yaitu keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi. Indikator Antropometri yang digunakan adalah berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Dalam penentuan status gizi menggunakan baku Antropometri WHO 2005.



Gambar 1.2 Grafik Status Gizi Balita Kabupaten Boogor 2019

Sumber: Disnakes Kabupaten Bogor.

Menurut data WHO, prevalensi BBLR diperkirakan sekitar 15-20% dari seluruh kelahiran di dunia, sebanyak lebih dari 20 juta bayi mengalami BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Hampir 95% kasus bayi dengan BBLR terjadi di negara dengan pendapatan rendah hingga menengah atau negara berkembang, dan 6%-nya terdapat di Asia Timur dan Pasifik, 13% di Afrika Sub-Sahara, dan 28% di Asia Selatan. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 7 negara di Asia Tenggara dengan prevalensi BBLR tertinggi yakni sebesar 7%. Sedangkan menurut data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi BBLR di Indonesia sebesar 10,2%, dengan angka tertinggi yakni di Sulawesi Tengah sebesar 16,9%. Pada tahun 2019 di Kabupaten Bogor menurut laporan puskesmas diperoleh angka BBLR laki-laki dan perempuan sebanyak 1.633 bayi atau sebesar 1,38% dari jumlah bayi lahir sebesar 116.630 bayi. Dari laporan tersebut 100% BBLR telah ditangani oleh tenaga kesehatan Posyandu sebagai ujung tombak kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem kewaspadaan dini gizi (SKD-KLB) melalui data SKDN (Sistem Kewaspadaan Dini Nakes), balita BGM dan 2T serta perilaku keluarga mandiri sadar gizi (kadarzi). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita melalui kegiatan posyandu dapat terlihat dari data cakupan D/S, sedangkan untuk keberhasilan program dapat dipantau dari capaian N/D. Target cakupan N/D dan D/S yang diharapkan adalah 85%, sementara cakupan yang dicapai tahun 2019 untuk N/D adalah 79,70% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 87,90%, namun masih dibawah dari target.

Kabupaten Bogor dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 435, dan dengan berdasarkan data yang telah diinput melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2021 diperoleh hasil prevalensi stunting sebesar 12,79%. Terdapat 68 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi fokus intervensi stunting, yaitu 9 desa di Kecamatan Cibungbulang, 5 desa di Kecamatan Pamijahan, 5 desa di Kecamatan Tanjungsari 4 desa di Kecamatan Leuwiliang, 4 desa di Kecamatan Cijeruk 4 desa di Kecamatan Jasinga, dan sisanya tersebar di Kecamatan Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Rumpin, Leuwisadeng, Tenjolaya, Sukaraja, Babakan Madang, Tamansari, Caringin, Cigombong, Parung, Rancabungur, Bojonggede, Klapanunggal, Sukamakmur, Cileungsi, Cariu dan Jonggol (Bogor, 2021)

Kesehatan anak menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Upaya penyadaran terhadap kesehatan bagi setiap warga perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat bahwa kondisi *stunting* bukan saja dilihat dari ukuran fisik si anak, melainkan adanya penghambatan yang terjadi pada organ tubuh lain seperti menurunnya fungsi otak atau berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak.

Mengingat kondisi yang telah dijabarkan peneliti mengenai stunting maka, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada bagaimana manajemen kampanye humas pemerintahan kabupaten Bogor pada program rembuk stunting untuk meningkatkan citra pemerintah kabupaten Bogor. literasi kesehatan cegah *stunting* tentang komunikasi kesehatan kepada

kader pemberdayaan masyarakat oleh program inovasi desa (PID) dalam rembuk *stunting* Kecamatan Bojonggede. Fokus penelitian ini menekankan, bagaimana pemahaman yang didapat oleh para kader desa setelah dilakukannya rembuk *stunting*, sehingga dapat memberikan perubahan sikap dalam upaya mencegah serta meminimalisir terjadinya kondisi *stunting* pada balita, dalam mewujudkan generasi yang sehat kedepannya. Literasi menjadi satu modal bagi terbentuknya kehidupan yang sehat terutama dalam hal ini berkaitan dengan kondisi *stunting* yang terjadi di Kecamatan Bojonggede.

Komunikasi merupakan suatu jembatan antara ketidaktahuan dan pemahaman yang melahirkan suatu persepsi, dengan persepsi inilah akan lahir sebuah tindakan yang berwujud pada perubahan bagi organisme di dalamnya. Maka, atas dasar ini pula pentingnya komunikasi bagi setiap hal dalam kehidupan untuk memberikan perubahan baik secara signifikan bagi setiap permasalahan yang muncul. Dalam hal ini, terkait pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi kesehatan melalui komunikasi yang dilakukan oleh PID tentang *stunting*. Lingkungan kesehatan saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketua PID, bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi di bidang kesehatan dalam upaya membantu para kader desa memahami permasalahan *stunting*, yang bahkan saat ini menjadi permasalahan tingkat Nasional. Maka, dengan adanya komunikasi yang dilakukan dapat memberikan pemahaman, bagaimana kader pemberdayaan masyarakat mampu menangani dan

melakukan upaya-upaya yang harus dilakukan warga untuk pencegahan dan pengobatan *stunting*.

Penyajian Informasi dalam bentuk komunikasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait literasi kesehatan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk menghadapi kesulitan khususnya dalam hal permasalahan *stunting* baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan desa. Menurut Amstrong dalam (Liliweri, 2018) berdasarkan hasil studi sosial pada kesehatan dengan laporan bahwa sebagian besar penyakit-penyakit yang diderita oleh individu ataupun “penyakit” masyarakat pada umumnya berasal dari ketidak tahuan dan merupakan kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang mereka peroleh. Karena hal ini masyarakat perlu memilih informasi kesehatan yang dikirim dan didapat manusia.

Kampanye Rembuk Stunting, ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Rembuk Stunting antara, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, dan Empat Kepala SKPD, yakni Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinkes, Kepala DPMD, dan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor.

Dalam rangka percepatan penanganan dan penajaman sasaran stunting, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan lokus fokus intervensi stunting tahun 2022 yaitu sebanyak 36 desa dari 21 kecamatan, meliputi 3 desa di Kecamatan Tanjungsari, 4 desa di Kecamatan Tamansari, 4 desa di Kecamatan Sukaraja, 3 desa di Kecamatan Rumpin, 3 desa di Kecamatan Pamijahan, 3 desa di Kecamatan Ciomas dan 2 desa di Kecamatan Jasinga, serta sisanya

tersebar satu desa di setiap Kecamatan Leuwisadeng, Leuwiliang, Kemang, Klapanunggal, Jonggol, Gunung Sindur, Dramaga, Cisarua, Cileungsi, Cijeruk, Cigudeg, Ciawi, Ciampea dan Babakan Madang.

Sebagaimana Plt Bupati Bogor mengatakan bahwa perlu kita ketahui, gizi merupakan salah satu penentu kualitas Sumber Daya Manusia dan perkembangan masalah gizi di Indonesia saat ini semakin kompleks, maka diperlukan komitmen yang kuat dalam menurunkan angka stunting di negara ini termasuk di Kabupaten Bogor. Kampanye pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkan Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit dengan pendekatan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan lintas sektor. Penanganan stunting di Kabupaten Bogor harus ditangani dengan super cepat dan gerak cepat. Untuk itu dengan adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor perlu mensukseskan gerakan nasional dengan mengintegrasikan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024 (Stranas Stunting), serta menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menegaskan penguatan komitmen, kelembagaan, kebijakan, program, pengawasan dan pelaporan. Menurut Iwan Setiawan bahwa sebagai upaya percepatan

penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bogor salah satunya dilakukan melalui Rembuk Stunting. Kegiatan tersebut ada di beberapa SKPD, terintegrasi dan tersentral sehingga penanganan stunting bisa lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Managament Kampanye Public Relations “Rembuk Stunting” dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Bogor”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi program Rembuk Stunting dikampanyekan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor?
2. Mengapa program Rembuk Stunting dijadikan upaya untuk meningkatkan citra di Pemerintah Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana kampanye Rembuk Stunting dalam meningkatkan citra di Pemerintah Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana peluang hambatan kampanye public relations dalam program Rembuk Stunting di Pemerintah Kabupaten Bogor?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar pembahasan tidak meluas, maka masalah yang hendak diteliti dibatasi pada:

“Managament Kampanye Public Relations dalam Program Rembuk Stunting untuk Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Bogor (*Studi Deskriptif Kualitatif di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bogor*)”

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian yang dikaitkan dengan obyek penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Manajemen Kampanye Public Relations dalam Program Rembuk Stunting untuk Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Bogor”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada maksud penelitian, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Analisa situasi kampanye Puvlic Relations “Komunikasi Rembuk Stunting” dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Pelaksanaan Kampanye Public Relations “Komunikasi Rembuk Stunting” dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Faktor Pendukung Penghambat kampanye Public Relations “Komunikasi Rembuk Stunting” dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.6 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti itu sendiri maupun pada masyarakat lainnya atau pihak-pihak yang berkepentingan.

a) Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan yang cukup baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen kampanye public relations dimasa yang akan datang. Serta dapat memperkuat teori yang telah ada untuk semakin besar digunakan dan dapat membantu bagi penelitian-penelitian lainnya. Khususnya bagi peneliti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa dibidang komunikasi manajemen kampanye Public Relations.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan langkah strategis bagi pihak pemerintah, khususnya bagian Humas di Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengelolaan kampanye “Rembuk Stunting” yang beredar ditengah Masyarakat.